

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)* (Surabaya : UWKS Press , 2018).
- J. Andy Hartanto, *Hukum Pertanahan, Hukum Jaminan, Dan Hukum Perusahaan*, 2nd ed. (Yogyakarta: LasBang Justitia, 2020), 230.
- D.Y.Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi)*, 2nd ed. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2015), 316.
- H. Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebendaan Yang Didambakan*, 2nd ed. (Bandung: PT. Alumni, 2006), 419.
- M. Bahsan , *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* , 5th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 163.
- Duwi Handoko, and et.all. *Hukum Perbankan Dan Bisnis (Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit)* . Hawa dan AHWA, 2019.
- Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, 2nd ed. (Batu: Literasi Nusantara, 2020), 302.
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi, Dan Tesis*, Google Books (CV. DOTPLUS Publisher, 2022), [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=cara+menganalisis+data+penelitian+normatif+&ots=AXKScAnll7&sig=1zLHNL\\_wPsUHnV2iONEfnY6QiMc&redir\\_es](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hNFIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=cara+menganalisis+data+penelitian+normatif+&ots=AXKScAnll7&sig=1zLHNL_wPsUHnV2iONEfnY6QiMc&redir_es)

c=y - v=onepage&q=cara menganalisis data penelitian normatif&f=false.

## II. JURNAL INTERNASIONAL/JURNAL NASIONAL

Yakobus Ori Banusu dan Antonius Denny Firmanto, “Kebahagiaan Dalam Ruang Keseharian Manusia ,” Forum 49, no. 2 (December 19, 2020)

Faisal Affandi, “FUNGSI UANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” EKSAYA : Jurnal Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2020), <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/eksya/article/view/505/422>.

Ismail Koto and Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi,” Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) 4, no. 2, 774–781, <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/739/pdf>.

Iwan Riswandie , “Eksekusi Jaminan Fidusia Berasaskan Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 3 (October 18, 2021): 365–384, <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/48/27>.

Alifa Cikal Yuanita, “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri,” Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities 3, no. 2 (November 30, 2022): 130.

Ni Putu and Ari Setyaningsih, “Analisis Tujuan Hukum Yang Dicapai Oleh Warga Negara Indonesia Melalui Perjanjian Perkawinan (Pre-Nuptial Agreement Dan Post Nuptial Agreement),” Analisis Tujuan Hukum Yang Dicapai oleh Warga Negara Indonesia Melalui Perjanjian Perkawinan (Pre-Nuptial Agreement dan Post Nuptial Agreement) 11, no. 2 (2021): 2685–9548, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belombahadat/article/download/759/411/>.

Muhammad Mpu Samudra and et.all, “Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum,” Unis.ac.id 1, no. 3 (2024): 1–10, <https://ejournal.unis.ac.id/index.php/JournalMahasiswa/article/view/3399/1868>.

Wibawa, M. Nuzul. “Aspek Hukum Perkreditan.” Aspek Hukum Perkreditan 2, no. 1 (February 2018): 15.

Anonimus . “BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Spesifikasi Penelitian UNIVERSITAS MEDAN AREA” (n.d.). [https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014\\_file%206.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf).

Probo Pribadi, “Mewujudkan Generasi Emas 2045 Melalui Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila

,” [Mediaakademik.com](http://Mediaakademik.com),

<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/461/458>

Rachmat Sazaki and et.all, “Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia ,” [Bajangjournal.com](http://Bajangjournal.com),

<https://bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/8296/6488>.

Debrina Rahmawati, “Makna Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rumah Susun,” [Wisnuwardhana.ac.id](http://Wisnuwardhana.ac.id),

<https://maksigama.wisnuwardhana.ac.id/index.php/maksigama/article/view/49/42>.

Ferry Irawan Febriansyah , “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa,” *Jurnal Untag 13* (n.d), <https://core.ac.uk/download/pdf/290097165.pdf>.

Junaidi Abdullah, “Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi),” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 2 (n.d.): 115.

Niru Anita Sinaga and Nurlaly Darwis , *Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Universitas Surya Darma , n.d., <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/534/500>.

Muhamad Rivansyah Gunawan and Siti Malikhatun Badriyah, “Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor,” *Notarius* 15, no. 1, 296–309.

## **I. HASIL PENELITIAN**

Suardita, I, and S Mh. Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

[https://simdos.unud.ac.id/uploads/file\\_penelitian\\_1\\_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf](https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf).

## **II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

“Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, [https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk\\_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf](https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf)..

Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Usaha Perusahaan Pembiayaan Bab II Bagian Kesatu Mengenai Jenis Kegiatan Usaha dan Cara Pembiayaan.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.



Pasal 8 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

### III. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN Pdg

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead07d33892490bcb8303935313134.html>.

### IV. WEBSITE/INTERNET

Rizkan Zulyadi, “Bab 1 Arti Dan Tujuan Hukum”,  
<http://rizkan.blog.uma.ac.id/tag/hukum/>, diakses 17 April 2024.

Rosyda. “Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, Dan Teori Nilai Uang - Gramedia Literasi.” Gramedia,<https://www.gramedia.com/literasi/uang/#>, diakses 17 April 2024.

Ananda. “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.” Gramedia Literasi.  
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses 29 April 2024.

Sisma, Agung, Annisa Fianni. “Menelaah 5 Macam Pendekatan Dalam Penelitian Hukum - Nasional Katadata.co.id.” Katadata.co.id.  
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses 2 Mei 2024.



Nikita Rosa, “Penelitian: Definisi, Ciri-Ciri, Hingga Macamnya,” Detikedu,  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5890769/penelitian-definisi-ciri-ciri-hingga-macamnya>, diakses 2 Mei 2024.

Wida Kurniasih, “Ideologi: Pengertian, Fungsi, Sejarah Dan Jenisnya,” Gramedia Literasi,  
<https://www.gramedia.com/literasi/ideologi/>, diakses 22 Agustus 2024.

Mochamad Aris Yusuf, “7 Fungsi Dan Peranan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia,” Gramedia.com, [https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-dan-peranan-pancasila/#google\\_vignette](https://www.gramedia.com/literasi/fungsi-dan-peranan-pancasila/#google_vignette), diakses 23 Agustus 2024.

BPIP RI, “BPIP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,” BPIP - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, <https://bPIP.go.id/berita/ideologi-pancasila-di-era-milenial>, diakses 23 Agustus 2024

Anonimus, “Bab II Tinjauan Pustaka” (UNAS Repository, 2023),  
<http://repository.unas.ac.id/6990/5/BAB%20II.pdf>, diakses 23 Agustus 2024.

Annisa, “Asas Legalitas : Pengertian, Tujuan Dan Prinsip,” Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut, <https://fahum.umsu.ac.id/asas-legalitas-pengertian-tujuan-dan-prinsip/>, diakses 1 September 2024.

Adi Condro Bawono, “Kedudukan KUH Pidana Dan KUH Perdata Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a>

[/kedudukan-kuh-pidana-dan-kuh-perdata-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt4f1e71d674972/](#), diakses 2 September 2024.

Rendra Topan, “Adagium Hukum | Hukum Positif Indonesia,” Hukum Positif Indonesia, <https://rendratopan.com/2019/03/18/adagium-hukum/>, diakses 11 Oktober 2024.

Willa Wahyuni, “Mengenai Asas Pacta Sunt Servanda ,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-lt63f4b06969233/?page=all>, diakses 11 Oktober 2024.

Renata Christha, “Parate Eksekusi: Pengertian, Dasar Hukum, Dan Contoh Kasus | Klinik Hukumonline,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593/>, diakses 25 Oktober 2024.

Tim Hukumonline3, “91 Adagium Hukum Terkenal Yang Wajib Dipahami Anak Hukum,” Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/adagium-hukum-lt619387-Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.-d0b9e9c/?page=all>, diakses 28 Oktober 2024.